

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Martarosa Maulidia¹, Ali Mudlofir²

^{1, 2}UIN Sunan Ampel Surabaya

¹maulidiamartarosa@gmail.com, ²mudlofir_ali@yahoo.com

ABSTRACT

This study analyzes the direction and content of government policies aimed at improving the quality of elementary education in Indonesia. The research was motivated by persistent issues such as low literacy and numeracy skills, unequal educational quality across regions, and varying teacher competence. Using a qualitative approach with a library research design, the study examines constitutional provisions, laws, government regulations, and ministerial decrees relevant to elementary education, including the National Education System Act, the National Education Standards Regulation, and the “Merdeka Belajar” policy. Data were analyzed through content analysis and normative descriptive techniques. The findings reveal that the government has established a comprehensive policy framework supported by standards of content, process, and evaluation; however, gaps remain in implementation, particularly in teacher capacity, educational infrastructure, and policy synchronization between central and local governments. The study concludes that continuous policy evaluation, teacher professional development, and evidence-based decision-making are crucial for sustaining educational quality improvement. This research contributes to understanding how coherent and adaptive educational policies can promote equitable and high-quality elementary education across Indonesia.

Keywords: educational policy, educational quality, elementary education

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis arah dan isi kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah, serta perbedaan kualitas guru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan, penelitian ini menelaah berbagai regulasi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kebijakan “Merdeka Belajar”. Data dianalisis melalui teknik analisis isi dan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki kerangka kebijakan yang komprehensif dengan dukungan standar isi, proses, dan evaluasi; namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas guru, sarana-

prasarana, serta sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, pengembangan profesionalisme guru, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kebijakan pendidikan yang sinergis dan adaptif untuk mencapai pemerataan dan kualitas pendidikan dasar yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan dasar

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional yang berperan penting membentuk karakter, kemampuan literasi, serta kompetensi dasar peserta didik. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan dasar menjadi tahap awal untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan dasar menjadi prioritas strategis pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mutu pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Hasil asesmen nasional dan survei internasional seperti PISA menegaskan masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar. Kesenjangan mutu pendidikan juga tampak nyata antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terutama di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik, kurangnya fasilitas belajar, serta lemahnya manajemen sekolah (Kawuryan et al., 2021).

Kebijakan pemerintah memegang peran penting dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut. Melalui regulasi, program nasional, dan desentralisasi pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dasar secara

sistematis. Dalam konteks ini, kebijakan publik di bidang pendidikan menjadi instrumen strategis untuk menjamin pemerataan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar di seluruh wilayah Indonesia (Sebayang & Swaramarinda, 2020). Implementasi berbagai kebijakan seperti Standar Nasional Pendidikan (SNP), Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak, dan sertifikasi guru menjadi bentuk nyata komitmen negara untuk memperkuat kualitas pendidikan dasar.

Mutu pendidikan yang baik tidak dapat diukur dari aspek akademik, karakter, sosial-emosional, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman. Pemerintah telah berupaya merespons tantangan tersebut melalui kebijakan *Merdeka Belajar* yang memberi ruang fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan peserta didik (Tabroni, Jamil, & Nurarita, 2022). Selain itu, kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada mutu (Bandur,

Hamsal, & Furinto, 2022). Meski berbagai kebijakan telah diterbitkan, problem implementasi masih menjadi isu utama. Ansori et al., (2021) menunjukkan bahwa kebijakan sering kali belum selaras antara tingkat pusat dan daerah, serta tidak selalu memperhatikan konteks lokal sekolah dasar. Di sisi lain, profesionalisme guru masih menjadi faktor penentu yang belum optimal, meskipun sudah ada kebijakan sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan (Sholihah et al., 2020).

Para peneliti sebelumnya telah membahas hubungan antara kebijakan pemerintah dan mutu pendidikan dasar. Ulum, (2020) menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan perangkat normatif utama untuk menjamin mutu melalui delapan standar pendidikan. Santika et al., (2022) memperkuat bahwa kebijakan standar isi pada tingkat dasar berperan besar dalam pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun kebijakan wajib belajar yang dikaji oleh Lewis & Nguyen, (2020) terbukti memiliki dampak kausal positif terhadap partisipasi pendidikan dasar, terutama di daerah kurang berkembang. Namun, Sebayang & Swaramarinda,

(2020) mencatat bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan masih dominan bersifat *top-down* sehingga sering tidak efektif pada tahap implementasi.

Peneliti lain menunjukkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sekolah jika disertai partisipasi aktif masyarakat dan transparansi (Bandur et al., 2022; Haryanti et al., 2022). Kepala sekolah juga memegang peran strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran (Ansori et al., 2021). Profesionalisme guru menjadi faktor dominan dalam menentukan mutu. Sholihah et al., (2020) menjelaskan bahwa kebijakan sertifikasi guru berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi, tetapi masih terkendala pemerataan pelatihan dan evaluasi berkelanjutan. Supriyanto et al., (2020) menambahkan bahwa inovasi pembelajaran digital selama pandemi turut memperkuat kompetensi profesional guru. Peneliti lain beranggapan bahwa kebijakan kurikulum adaptif dan inovatif berkontribusi langsung terhadap mutu pendidikan (Pramana et al., 2021; Tabroni et al., 2022). Adapun peneliti yang menyoroti faktor sosial dan

ekonomi menegaskan bahwa kedua faktor tersebut mempengaruhi mutu pendidikan dasar, terutama kesenjangan fasilitas dan kualitas guru antara kota dan daerah 3T (Eriyanti et al., 2020; Kawuryan et al., 2021). Studi Shaturaev, (2021) menggarisbawahi pentingnya efisiensi kebijakan, peningkatan pendanaan, serta keselarasan visi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Dari keseluruhan literatur tersebut, belum ada analisis integratif terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia, untuk memahami arah, isi, dan konsistensinya dalam menjawab persoalan yang masih dihadapi dunia pendidikan dasar saat ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, menganalisis isi dan arah kebijakan pemerintah yang mengatur peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia; *kedua*, menilai relevansi dan sinergi antar kebijakan, serta sejauh mana kebijakan tersebut mendukung kualitas guru, kurikulum, dan hasil belajar siswa di tingkat pendidikan dasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap dokumen kebijakan pemerintah dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menghimpun data lapangan, tetapi menganalisis secara konseptual dan normatif isi kebijakan serta arah pelaksanaannya dalam sistem pendidikan nasional. Sumber data utama terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 Pasal 31, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta beberapa Permendikbudristek seperti No. 21–23 Tahun 2016, No. 25 Tahun 2020, dan No. 56 Tahun 2022. Sumber sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu dari jurnal nasional dan internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur sistematis, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan deskriptif

normatif. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna, arah, dan sasaran kebijakan, sedangkan analisis deskriptif menilai keselarasan kebijakan dengan tujuan pendidikan nasional. Validitas data dijaga melalui pemilihan sumber resmi, triangulasi antar-literatur, dan konsistensi interpretasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Indonesia

Kebijakan pemerintah merupakan instrumen utama dalam membangun sistem pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Di Indonesia, kebijakan pendidikan dasar memiliki landasan hukum yang kuat mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis. Setiap level kebijakan memiliki peran berbeda namun saling melengkapi: konstitusi dan undang-undang memberikan arah normatif, sementara peraturan pemerintah dan peraturan menteri mengatur mekanisme pelaksanaan teknis. Berikut analisis keterpaduan antar-kebijakan tersebut dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan dasar.

Pertama, Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Prinsip konstitusional ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini menjadi pilar utama kebijakan mutu karena memuat tujuan, prinsip, serta standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar.

UU Sisdiknas menjadi rujukan kebijakan paling fundamental dalam membangun sistem pendidikan nasional yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Namun, Shaturaev, (2021b) mengkritik implementasinya yang sering kali belum konsisten antara kebijakan pusat dan daerah. Dalam konteks pendidikan dasar, hal ini berpengaruh terhadap kesenjangan mutu antarwilayah. Dalam studinya yang lain, ia juga menyoroti pentingnya konsistensi pendanaan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Menurutnya, proporsi anggaran 20 persen dari APBN dan APBD belum sepenuhnya diarahkan untuk

peningkatan kualitas proses pembelajaran di tingkat dasar, melainkan lebih banyak terserap pada kebutuhan administratif. Ketidakefisienan alokasi ini menjadi tantangan kebijakan yang harus dibenahi agar mutu pendidikan dasar dapat meningkat secara signifikan (Shaturaev, 2021b).

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (yang diperbarui melalui PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015) menjabarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan mutu pendidikan di seluruh jenjang, termasuk pendidikan dasar. Delapan standar tersebut mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian.

PP ini merupakan turunan langsung dari UU Sisdiknas yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu pendidikan nasional. Namun, Shaturaev, (2021c) menemukan bahwa meskipun SNP telah menjadi acuan formal, banyak sekolah dasar di Indonesia belum mampu memenuhi standar secara menyeluruh, terutama dalam aspek

kompetensi guru dan sarana pembelajaran. Ia menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pengawasan mutu agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dan berorientasi pada hasil belajar siswa. Dalam praktiknya, PP 19/2005 menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kebijakan turunan, seperti Permendikbud No. 21–23 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022, yang berfokus pada implementasi standar isi, proses, dan penilaian pendidikan dasar.

Ketiga, Permendikbud No. 21, 22, dan 23 Tahun 2016 yang menjabarkan standar isi, proses, dan penilaian. Serangkaian peraturan ini memberikan kerangka operasional yang konkret bagi sekolah dasar dalam menerapkan SNP. a) Permendikbud No. 21 Tahun 2016 mengatur Standar Isi dengan menekankan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan relevansi konteks local; b) Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menetapkan Standar Proses, yaitu prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; dan c) Permendikbud No. 23 Tahun 2016 berfokus pada Standar Penilaian

hasil belajar yang objektif dan berkelanjutan.

Penerapan tiga standar tersebut di tingkat sekolah dasar telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen pembelajaran. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan kemampuan guru dalam memahami substansi peraturan (Hardiansyah, 2022). Dalam konteks ini, kompetensi profesional guru menjadi penting agar kebijakan standar proses dapat terwujud secara optimal. Guru yang kreatif dan beradaptasi dengan teknologi mampu mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kebijakan mutu. Oleh sebab itu, sinergi antara peraturan teknis dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prasyarat utama keberhasilan peningkatan mutu pendidikan dasar (Supriyanto et al., 2020).

Kebijakan pendidikan mengalami transformasi besar dengan lahirnya dua regulasi penting, yaitu Permendikbudristek No. 25 Tahun 2020 tentang Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan serta Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Implementasi Kurikulum

Merdeka. Kedua kebijakan ini menjadi tonggak reformasi dalam pengukuran dan pengembangan mutu pendidikan dasar. Menurut Mustofa, Lin, & Chen, (2023), kebijakan Kurikulum Merdeka memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kemampuan peserta didik. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari pendidikan yang berpusat pada guru menuju pendidikan yang berpusat pada siswa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar menyambut positif kebijakan ini karena meningkatkan kreativitas dan relevansi pembelajaran.

Tabroni et al., (2022) menambahkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar secara strategis dirancang sebagai solusi atas stagnasi mutu pendidikan nasional. Melalui penerapan kurikulum fleksibel dan evaluasi berbasis kompetensi, sekolah dasar diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga berkarakter dan adaptif terhadap perubahan sosial. Selain itu, kebijakan Rapor Pendidikan yang diatur dalam Permendikbudristek No. 25 Tahun 2020 berfungsi sebagai alat evaluasi

berbasis data untuk memetakan capaian mutu setiap sekolah dasar. Pramana et al., (2021) menilai bahwa sistem ini merupakan bentuk pergeseran dari evaluasi berbasis ujian nasional ke asesmen diagnostik yang lebih manusiawi dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menilai hasil, tetapi juga memetakan proses dan konteks pembelajaran yang mempengaruhi mutu.

Sinergi antar-kebijakan pendidikan dasar dapat dilihat dari keterpaduan arah antara regulasi normatif (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) dengan kebijakan teknis (PP dan Permendikbudristek). Shaturaev, (2021c) menyebut bahwa keberhasilan sistem pendidikan bergantung pada kohesi antaraturan, bukan sekadar banyaknya kebijakan. Di tingkat strategis, UU Sisdiknas dan PP tentang SNP memberikan dasar filosofis dan struktural bagi mutu pendidikan.

Selanjutnya, Permendikbud / Permendikbudristek menurunkannya ke level operasional melalui pedoman kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Kebijakan baru seperti Kurikulum Merdeka dan Rapor Pendidikan

memperkuat dimensi evaluatif dan adaptif dari sistem mutu. Penelitian oleh Eriyanti et al., (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-ekonomi daerah. Sekolah dasar di wilayah pesisir atau komunitas marginal masih kesulitan memenuhi standar mutu karena keterbatasan fasilitas dan guru. Oleh karena itu, integrasi kebijakan pusat-daerah perlu diperkuat agar setiap kebijakan nasional benar-benar inklusif.

Berdasarkan analisis kebijakan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dasar semakin komprehensif dan berorientasi pada pembelajaran yang adaptif. Shaturaev, (2021c) menyebutnya sebagai pergeseran dari *policy of control* menuju *policy of empowerment*, yakni kebijakan yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga memberdayakan sekolah dan guru. Kendati demikian, tantangan masih ada dalam hal sinkronisasi kebijakan lintas level dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di sekolah dasar. Karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi kebijakan yang

berkelanjutan serta peningkatan dukungan anggaran untuk pelatihan guru dan penguatan infrastruktur pembelajaran. Sinergi antara regulasi normatif dan kebijakan teknis menjadi kunci dalam memastikan mutu pendidikan dasar yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada peserta didik. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai motor transformasi sistem pendidikan dasar menuju kualitas yang unggul dan merata di seluruh Indonesia.

Evaluasi Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia telah diimplementasikan melalui berbagai instrumen hukum dan program strategis. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun efektivitas koordinasi antarlembaga pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar

serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan mutu pendidikan dasar di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan antara rancangan normatif dan praktik di lapangan. Pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang menjadi pondasi pemerataan pendidikan belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas proses pembelajaran. Kebijakan wajib belajar berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi belum secara signifikan memperbaiki kompetensi dasar siswa (Lewis & Nguyen, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung fokus pada aspek kuantitatif (akses) daripada kualitatif (mutu).

Dalam konteks mutu guru, kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan motivasi guru, namun peningkatan kompetensi pedagogik tidak selalu sebanding dengan kenaikan tunjangan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih bersifat administratif dan belum menyentuh peningkatan kualitas pengajaran secara substantif

(Sholihah et al., 2020). Lebih lanjut, Supriyanto et al., (2020) menyoroti pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi selama pandemi COVID-19. Studi mereka menunjukkan bahwa dukungan kebijakan digitalisasi pembelajaran belum merata, terutama di sekolah dasar di daerah rural. Masih banyak guru yang belum terlatih menggunakan media teknologi secara efektif, sehingga tujuan kebijakan transformasi digital belum sepenuhnya tercapai. Aspek konteks dan input kebijakan pendidikan masih menjadi titik lemah karena keterbatasan dukungan sumber daya dan kesiapan lembaga pendidikan dasar dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Menurut Suryana et al., (2023), kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kesiapan institusi serta kesetaraan akses antardaerah.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) belum sepenuhnya berjalan efektif karena keterbatasan kapasitas manajerial kepala sekolah. Walaupun kebijakan MBS dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan otonomi sekolah, praktik di lapangan masih menunjukkan dominasi pendekatan

birokratis. Sekolah sering kali menunggu arahan dari dinas pendidikan tanpa mampu mengambil inisiatif inovatif yang berorientasi pada mutu (Sulistiyo et al., 2020). Selain itu, kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah dasar Lombok Timur belum sepenuhnya diintegrasikan dengan kurikulum nasional. Padahal, pendekatan lokal dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter dan meningkatkan relevansi pembelajaran (Tohri et al., 2022). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik kontekstual di daerah.

Dari hasil evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan dasar sangat bergantung pada tiga faktor utama: *Pertama*, kapasitas sumber daya manusia, khususnya guru dan kepala sekolah; *kedua*, dukungan sarana-prasarana serta teknologi pembelajaran; dan *ketiga*, konsistensi pelaksanaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan komprehensif untuk

meningkatkan mutu pendidikan dasar, masih terdapat sejumlah hambatan struktural dan operasional. Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung berorientasi pada birokrasi dan belum berbasis pada data empiris. Akibatnya, kebijakan sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan nyata di sekolah dasar (Sebayang & Swaramarinda, 2020). Kebijakan pendidikan yang diterapkan di kawasan pesisir Kota Padang tidak mampu sepenuhnya menjangkau anak-anak nelayan yang mengalami keterbatasan ekonomi. Kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) memang membantu pembiayaan, tetapi belum efektif menurunkan angka putus sekolah karena faktor sosial dan ekonomi keluarga masih menjadi penghambat utama (Eriyanti et al., 2020).

Kebijakan nasional sering kali tidak diikuti dengan kesiapan tenaga pengajar yang memadai. Banyak guru di tingkat dasar yang belum memiliki kompetensi linguistik dan pedagogik yang sesuai dengan tuntutan kurikulum (Sulistiyo et al., 2020). Hal ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antara kebijakan pendidikan dan pelatihan guru. Selain

itu, studi Sukmayadi dan Yahya (2020) menggarisbawahi bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan abad ke-21, seperti kebutuhan literasi digital, berpikir kritis, dan kreativitas. Mereka berpendapat bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan paradigma global. Tanpa reformasi substansial dalam pembelajaran di tingkat dasar, mutu pendidikan nasional sulit mencapai standar internasional.

Berdasarkan evaluasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat kebijakan peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia: *Pertama*, memperkuat kapasitas guru dan kepala sekolah. Program sertifikasi guru perlu disertai dengan pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan pedagogi modern dan integrasi teknologi pembelajaran; *kedua*, memperluas digitalisasi pendidikan yang inklusif. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur TIK serta menyediakan pendampingan teknis agar digitalisasi pendidikan tidak menimbulkan kesenjangan baru; *ketiga*, memperkuat pendekatan berbasis kearifan lokal. Kebijakan

pendidikan dasar harus memberi ruang bagi adaptasi kurikulum dengan nilai dan budaya lokal agar pembelajaran lebih relevan. Integrasi nilai lokal dalam pendidikan karakter akan membantu membangun identitas nasional sekaligus memperkuat keterikatan peserta didik terhadap lingkungannya; *keempat*, meningkatkan efektivitas desentralisasi kebijakan pendidikan. Pemerintah pusat harus berperan sebagai fasilitator, bukan hanya regulator, sehingga kebijakan mutu dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah dasar; *kelima*, memperkuat sistem evaluasi kebijakan berbasis data. Evaluasi kebijakan perlu memanfaatkan data hasil Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi kesenjangan mutu antarwilayah. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) akan membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan; dan *terakhir*, sinergi antar-kebijakan perlu ditingkatkan agar kebijakan normatif dan teknis saling mendukung. Pemerintah perlu menyusun peta jalan (roadmap) mutu pendidikan dasar yang menjelaskan keterkaitan antara regulasi, sumber daya, dan indikator hasil belajar.

Dengan cara ini, kebijakan tidak lagi berjalan parsial, tetapi terintegrasi menuju tujuan pembangunan pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkualitas.

Evaluasi implementasi kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan yang cukup kuat untuk peningkatan mutu pendidikan dasar, tetapi efektivitasnya masih terkendala oleh disparitas implementasi, rendahnya kapasitas guru, dan lemahnya sistem evaluasi. Oleh karena itu, fokus utama kebijakan ke depan adalah membangun sistem mutu pendidikan dasar yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, yang mampu mengakomodasi keragaman wilayah serta memperkuat peran sekolah sebagai pusat pembelajaran yang bermakna.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu pendidikan dasar telah menunjukkan arah yang semakin komprehensif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Adapun beberapa perbaikan yang perlu dilakukan

adalah meningkatkan profesionalisme guru, menguatkan kapasitas kepala sekolah dan manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, memperluas akses infrastruktur, dan sinkronisasi kebijakan lintas level agar implementasi lebih efisien dan relevan dengan konteks lokal. Untuk penelitian lanjutan, disarankan adanya kajian empiris terhadap efektivitas kebijakan Merdeka Belajar dan Rapor Pendidikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa di berbagai daerah, sehingga dapat diperoleh bukti kuat untuk mendukung reformasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A., Suyatno, S., & Sulisworo, D. (2021). School principal's role in increasing teachers' pedagogical and professional competence in elementary schools in Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(1), 98–112. <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i1.35635>
- Bandur, A., Hamsal, M., & Furinto, A. (2022). 21st Century experiences in the development of school-based management policy and practices in Indonesia. *Educational Research for Policy and Practice*, 21(1), 85–107. <https://doi.org/10.1007/s10671-021-09293-x>

- Eriyanti, F., Engkizar, E., Alhadi, Z., Moeis, I., Murniyetti, M., Yulastri, A., & Syafril, S. (2020). The Impact of Government Policies towards the Economy and Education of Fishermen's Children in Padang City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469(1), 1–7.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012057>
- Hardiansyah, F. (2022). The Implementation of School Based Management in Primary School. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 148–162.
<https://doi.org/10.52690/jswse.v2i3.257>
- Kawuryan, S. P., Sayuti, S. A., Aman, & Dwiningrum, S. I. A. (2021). Teachers Quality and Educational Equality Achievements in Indonesia Sekar. *International Journal of Instruction*, 14(2), 811–830.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29333/iji.2021.14245a>
- Lewis, B. D., & Nguyen, H. T. M. (2020). Assessing the causal impact of compulsory schooling policy in Indonesia. *International Journal of Educational Research*, 104(June), 101693.
<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101693>
- Mustofa, Lin, C. Y., & Chen, H. H. (2023). Elementary teachers' beliefs and practices pertaining to freedom of learning curriculum reform policy: A qualitative study. *International Journal of Education and Practice*, 11(2), 166–179.
<https://doi.org/10.18488/61.v11i2.3289>
- Pramana, C., Chamidah, D., Suyatno, S., Renadi, F., & Syaharuddin, S. (2021). Strategies to improved education quality in Indonesia: A review. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, 12(3), 1977–1994. Retrieved from
[https://www.researchgate.net/publication/353299393%0AStrategi es](https://www.researchgate.net/publication/353299393%0AStrategi%20es)
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29–36.
<https://doi.org/10.46650/jsds.4.1.1263.29-36>
- Sebayang, K. D. A., & Swaramarinda, D. R. (2020). Educational policy implementation in Indonesia: The art of decision making. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 1286–1290. Retrieved from
<https://www.ijstr.org/final-print/jan2020/Educational-Policy-Implementation-In-Indonesia-The-Art-Of-Decision-Making-.pdf>
- Shaturaev, J. (2021a). 2045: Path to nation's golden age (Indonesia Policies and Management of Education). *"Science and Education" Scientific Journal*, 2(12), 866–875. Retrieved from
<https://orcid.org/0000-0003-3859-2526>
- Shaturaev, J. (2021b). Education in Indonesia: Financing, Challenges of Quality and Academic Results in Primary Education. *ResearchGate*, (April).

- <https://doi.org/10.54613/001003>
- Shaturaev, J. (2021c). Indonesia: Superios Policies and Management for Better Education (Community development through Education). *ResearchGate*, 1(December), 1–11. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/357271101>
- Sholihah, M., Ratnasari, K., Permatasari, Y. D., Muawanah, U., & Fajri, A. N. F. (2020). The policy of educators' certification : An effort to improve quality, qualification, and teachers' competence. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012130>
- Sulistiyo, U., Haryanto, E., Widodo, H. P., & Elyas, T. (2020). The portrait of primary school English in Indonesia: policy recommendations. *Education 3-13*, 48(8), 945–959. <https://doi.org/10.1080/03004279.2019.1680721>
- Supriyanto, A., Hartini, S., Irdasari, W. N., Miftahul, A., Oktapiana, S., & Mumpuni, S. D. (2020). Teacher professional quality: Counselling services with technology in Pandemic Covid-19. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10(2), 176–189. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v10i2.7768>
- Suryana, D., Husna, A., & Mahyuddin, N. (2023). CIPP Evaluation Model: Analysis of Education Implementation in PAUD Based on Government Policy on Implementation of Learning During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4386–4396. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.3722>
- Tabroni, I., Jamil, N. A., & Nurarita, N. (2022). Merdeka Belajar Policy as a Strategy to Improve Quality of Education. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 13(01), 1–12. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v13i01.5492>
- Tohri, A., Rasyad, A., Sururuddin, M., & Istiqlal, L. M. (2022). The urgency of Sasak local wisdom-based character education for elementary school in East Lombok, Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 11(1), 333–344. <https://doi.org/10.11591/ijere.v11i1.21869>
- Ulum, M. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 11(1), 105–116. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>